

**Laporan Realisasi Program /Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84.250.965.432	18,28	18,28	0,00	10.470.528.245	12,43	5.938.953.689	7,05	5,38				
1.1	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.325.300	34,00	34,00	0,00	24.938.800	31,84	23.161.800	29,57	2,27				
1.1.1	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.373.700	46,00	46,00	0,00	10.973.700	45,02	10.730.100	44,02	1,00			<p>1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renstra : Dokumen dari Dokumen</p> <p>2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja : Dokumen dari Dokumen</p> <p>3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan : Dokumen dari Dokumen</p> <p>4. Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKT : Dokumen dari Dokumen</p> <p>5. Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK/ROPK Perubahan : Dokumen dari Dokumen</p> <p>6. Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK/ROPK Perubahan: BA Forum OPD : 1 Dokumen dari Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pengumpulan bahan / dokumen Resntra</p> <p>2. Koordinasi penyusunan Rentra BPKA 2022 - 2027</p> <p>3. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>4. Proses entry ROPK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 243.600,- terdiri dari : 1. Bel. Cetak sebesar Rp. 900,- 2. Bel. bahan komputer sebesar Rp. 217.700,- dikarenakan terdapat negosiasi harga pada Mbiz dan 3. Bel. makan minum rapat sebesar Rp. 25.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</p> <p>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</p> <p>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
1.1.2	5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.738.700	27,80	27,80	0,00	8.145.100	23,45	7.163.900	20,62	2,83			<p>1. Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 Dokumen dari Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya dokumen DPA BPKA 2023</p> <p>2. Tersusunnya dokumen RAK 2023</p> <p>3. Tersedia nya dokumen DPA BPKA tahun 2023</p> <p>4. Tersedia nya sarana pendukung kegiatan</p> <p>5. Tersusunnya dokumen RAK pergeseran 1 /2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 981.200,- terdiri dari : 1. Bel. cetak Rp. 100,- 2. Bel. bahan komputer Rp 681.100,- di karenakan terdapat negosiasi harga pada Mbiz dan 3. Bel. makan minum rapat sebesar Rp. 300.000,- dalam proses SPJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</p> <p>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.1.3	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.212.900	30,00	30,00	0,00	5.820.000	30,29	5.267.800	27,42	2,87			<p>1. Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : dokumen LKIP dengan nilai AKIP "A" (Skor 87,60 : dokumen dari dokumen</p> <p>2. Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja : konsep/bahan LKPJ : dokumen dari dokumen</p> <p>3. Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja : konsep/bahan LPPD : dokumen dari dokumen</p> <p>4. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: laporan movev timbal balik triwulanan : dokumen dari dokumen</p> <p>5. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: movev bulanan : 3 dokumen dari dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya data dan bahan penyusunan LKIP, LPPD dan LKPJ</p> <p>2. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi bulan Februari</p> <p>3. Tersusunnya dokumen PK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 552.200,- terdiri dari : 1. Bel. ATK sebesar Rp. 190.000,- 2. Bel. cetak Rp. 200,- 3. Bel. bahan komputer Rp. 62.000,- dan 4. Bel. makan minum rapat Tp. 300.000,- dalam proses SPJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</p> <p>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</p> <p>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
<b>1.2</b>	<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>81.423.559.896</b>	<b>18,02</b>	<b>18,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.747.695</b>	<b>12,04</b>	<b>5.382.182.981</b>	<b>6,61</b>	<b>5,43</b>				
1.2.1	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.327.209.896	18,00	18,00	0,00	9.777.708.195	12,02	5.356.338.681	6,59	5,43			<p>1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN : tahun dari tahun</p> <p>2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 240 orang/Bulan dari orang/Bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya pengajuan SPP dan SPM Gaji</p> <p>2. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BPKA DIY</p> <p>3. Tersusunnya laporan gaji bulan Februari 2023</p> <p>4. Tersusunnya laporan gaji bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret 2023, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.421.369.514 terdiri dari : 1. Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 1.818.442.810,- 2. Gaji pokok PPPK Rp. 503.075.080,- 3. Bel. Tunj keluarga Rp. 173.382.688,- 4. Bel. Tunj Jab PNS Rp. 100.460.000,- 5. Bel. Tunj Fungs PNS Rp. 47.240.000,- 6. Bel. Tunj fung umum PNS Rp. 77.305.000,- 7. Bel. Tunj Beras Rp. 96.246.180,- 8. Bel. Tunj PPH Rp. 7.805.635,- 9. Bel. Pembulatan gaji Rp. 28.249,- 10. Bel. Jaminan Kes PNS Rp. 21.878.508,- 11. Bel. Jam kes PPPK Rp. 615.879,- 12. Bel Jam kclkn PNS Rp. 541.232,- 13. Bel Jam kclkn PPPK Rp. 56.673,- 14. Bel. Jam kematian PNS Rp. 723.625,- 15. Bel. Jam kematian PPPK Rp. 113.706 dan Bel Taperum Rp. 713.769.531,- , 16. TPP PNS Rp. 723.689.822,- 17. TPP PPPK Rp. 135.995.496</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</p> <p>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</p> <p>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
1.2.2	5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	65.100.000	26,50	26,50	0,00	16.275.000	25,00	16.080.000	24,70	0,30			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyusunan SK Penanggungjawab Pengelola keuangan</p> <p>2. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												SKPD : 3 Dokumen dari Dokumen	sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 195.000,- adalah adanya selisih antara DPA dengan SHBJ pada honorarium penyiap gaji <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.2.3	5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.750.000	61,00	61,00	0,00	7.034.500	39,63	7.034.300	39,63	0,00			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari Laporan</li> <li>2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Unaudited : 1 laporan dari laporan</li> <li>3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Audited : laporan dari laporan</li> </ul>	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Proses Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun 2. Tersedianya sarana pendukung kegiatan 3. Tersusunnya laporan keuangan Unaudited <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.2.4	5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000	23,50	23,50	0,00	2.730.000	20,22	2.730.000	20,22	0,00			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : Laporan dari Laporan</li> </ul>	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan 2. Tersusunnya laporan keuangan bulan Februari 3. Terkumpulnya bahan laporan keuangan triwulanan <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
<b>1.3</b>	<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>33.600.000</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.000</b>	<b>25,00</b>	<b>8.400.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>				
1.3.1	5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	25,50	25,50	0,00	8.400.000	25,00	8.400.000	25,00	0,00			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 Laporan dari Laporan</li> </ul>	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan SK Tim Pengelola Barang Milik Daerah 2. Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah 3. Tersedianya dokumen inventaris barang <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.4	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.744.900	26,00	26,00	0,00	1.240.500	26,14	897.000	18,90	7,24				
1.4.1	5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.744.900	26,00	26,00	0,00	1.240.500	26,14	897.000	18,90	7,24			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3 Dokumen dari Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi internal penilaian kinerja pegawai</li> <li>Terlaksananya penyerahan SK Jabatan administrasi pelaksana pada 6 pegawai di lingkungan BPKA</li> <li>Terlaksananya pembinaan pegawai terkait dengan disiplin kepegawaian</li> <li>Tersampainya infoemasi terkait kinerja kepegawaian</li> <li>Tersedianya sarana pendukung kegiatan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 343.500,- terdiri dari : 1. Bel. ATK Rp. 72.000,- , dalam proses SPJ terdiri : 1. . Bel. Cetak Rp. 30.000 dan Bel. makan minum rapat Rp. 241.500,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</li> <li>SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>
1.5	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.066.500	29,77	29,77	0,00	213.937.200	27,01	156.489.177	19,76	7,25				
1.5.1	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.748.500	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari Paket 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan: komponen instalasi listrik : paket dari paket 3. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan: komponen penerangan : paket dari paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kebutuhan bahan/alat listrik</li> <li>Identifikasi kebutuhan bahan penerangan bangunan kantor</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</li> <li>SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>
1.5.2	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.706.000	26,64	26,64	0,00	38.242.200	24,56	37.024.714	23,78	0,78			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari Paket 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: peralatan : 1 paket dari paket 3. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya bahan kegiatan kantor berupa Alat Tulis Kantor</li> <li>Tersedianya bahan kegiatan kantor berupa kertas dan cover</li> <li>Tersedianya bahan kegiatan kantor berupa bahan komputer</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Disediakan: perlengkapan : 1 paket dari paket	1.218.086,- terdiri dari : Belum di belanjakan : 1. Bel. ATK Rp. 458.900,- 2. Bel. kertas dan cover Rp. 257.500,- dan Bel. bahan komputer Rp. 502.286,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.5.3	5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.300	15,24	15,24	0,00	2.690.600	3,84	2.690.600	3,84	0,00			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari Paket 2. Tersedianya Jumlah peralatan kebersihan : paket dari paket 3. Tersedianya Jumlah bahan kebersihan : 1 Paket dari Paket 4. Tersedianya Jumlah perlengkapan kebersihan : 1 Paket dari Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan 2. Inventarisasi bahan kebutuhan rumah tangga 3. Tersedianya bahan bahan kebersihan rumah tangga <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.5.4	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.218.500	38,40	38,40	0,00	46.520.000	36,86	32.273.650	25,57	11,29			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari Paket 2. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan: cetakan : 2 paket dari paket 3. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan: penggandaan : paket dari paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya bahan cetak berupa Bend 26 2. Tersedianya bahan cetak berupa Amplop casing dan Stop map berkop 3. Tersedianya bahan cetak berupa lembar disposisi 4. Tersedianya bahan cetak berupa kotak arsip 5. Terpenuhinya penggandaan dokumen administrasi kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 18.403.350,- adalah berupa belanja penggandaan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.5.5	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.144.800	26,70	26,70	0,00	1.800.000	17,74	1.773.000	17,48	0,26			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari Dokumen 2. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: bahan bacaan : 1 dokumen dari dokumen 3. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: peraturan perundang-	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terpenuhinya bahan bacaan berupa Koran dan surat kabar 2. Terpenuhinya bahan bacaan berupa maalah gatra 3. Terpenuhinya bahan bacaan sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														undangan : dokumen dari dokumen	DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.5.6	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.248.400	31,40	31,40	0,00	124.684.400	29,60	82.727.213	19,64	9,96			<p>1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 Laporan dari Laporan</p> <p>3. Terselenggaranya penataan arsip SKPD : dokumen dari dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pemenuhan jamuan kunungan tamu dari Cilegon</li> <li>2. Terlaksananya evaluasi pengelolaan arsip</li> <li>3. Terlaksananya pemenuhan jamuan kunungan tamu kunungan kera dari NTB</li> <li>4. Terlaksananya sewa kendaraan angkutan untuk distribusi arsip</li> <li>5. Terlaksananya Fumigasi dan pengendalian hama tikus</li> <li>6. Terlaksananya perajalanan luar daerah ke Bappenas, Pansus DPRD terkait rancangan Perda</li> <li>7. Terlaksananya perjalanan luar daerah ke Jakarta dalam rangka Sosialisasi UU no 1 tahun 2022</li> <li>8. Terlaksananya perjalanan luar daerah ke Lampung dalam rangka Rakor pengelolaan dana transfer</li> <li>9. Terlaksananya fumigasi dan pengendalian hama tikus s.d. bulan maret</li> <li>10. Terlaksananya perjalanan luar daerah ke Jawa Timur mendampingi Komisi B DPRD DIY tgl. 8-9 maret</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi sudah sesuai target pada bulan Maret 2023, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 51.432.063,- terdiri dari : Belum di belanakan : 1. Bel. kertas dan cover Rp. 320.000,- 2. Bel. bahan komputer Rp. 1.468.400 dan bel. pembersihan hama Rp. 11.170.000,- kemudian pada belanja : 1. makan dan minum rapat Rp. 1.560.000,- dan bel. peralanan dinas Rp. 36.913.663,- menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</li> <li>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol>
1.6	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
1.6.1	5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
1.7	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.506.330.236	24,49	24,49	0,00	346.747.550	23,02	312.864.303	20,77	2,25				
1.7.1	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.950.000	26,10	26,10	0,00	6.107.000	24,48	4.920.000	19,72	4,76			<p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari Laporan</p> <p>2. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat: benda pos : 1 laporan dari laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan kegiatan kantor berupa benda pos (Materai)</li> <li>2. Terselaksananya belanja paket pengiriman surat dinas</li> <li>3. Terselaksananya penatausahaan surat masuk</li> <li>4. Terselaksananya penatausahaan surat keluar</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat: jasa pengiriman : 1 laporan dari laporan	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.187.000,- terdiri dari : 1. Bel. benda pos Rp. 840.000,- dan Bel. paket pengiriman Rp. 347.000,- dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.7.2	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	915.745.836	25,63	25,63	0,00	228.836.150	24,99	196.874.843	21,50	3,49			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari Laporan 2. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan: jasa komunikasi : 1 laporan dari laporan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan: jasa sumberdaya air : 1 laporan dari laporan 4. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan: jasa listrik : 1 laporan dari laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terbayarkannya tagihan Telepon bulan Maret 2023 2. Terbayarkannya tagihan Air bulan maret 2023 3. Terbayarkannya tagihan Listrik bulan Maret 2023 4. Terbayarkannya tagihan Fax/internet bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik pada bulan Maret 2023, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 31.961.307,- terdiri dari : 1. Bel. Tag Telepon Rp. 1.347.100,- 2. Bel. Tag Air Rp. 119.400 dan Bel. Tag Listrik Rp. 30.262.527,- 4. Bel Tag. Internet Rp. 232.280,- dikarenakan mensyaaiakan tagihan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.7.3	5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.000.000	16,21	16,21	0,00	12.700.000	12,83	12.369.460	12,49	0,34			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari Laporan 2. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: jasa peralatan : 1 laporan dari laporan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: jasa perlengkapan : 1 laporan dari laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terpenuhnya belanja sewa peralatan cetak bulan Februari 2. Terpenuhnya belanja sewa pengharum ruangan TW 1 3. Terpenuhnya belanja sewa tanaman TW 1 4. Terpenuhnya belanja sewa peralatan cetak bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 330.540,- terdiri dari : 1. Bel. sewa pengharum ruangan Rp. 5.540,- dan Bel. sewa mesin cetak/fc sebesar Rp. 325.000,- di karenakan menyesuaikan invoice <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.7.4	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.634.400	23,92	23,92	0,00	99.104.400	21,24	98.700.000	21,15	0,09			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Proses pengadaan Jasa pelayanan umum kantor 2. Tersusunnya SK Pejabat pengadaan 3. Terpenuhnya pemeliharaan kebersihan gedung kantor TW 1

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>2. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan: jasa kebersihan : 1 laporan dari laporan</p> <p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan: jasa keamanan : 1 laporan dari laporan</p>	<p>4. Terpenuhinya jasa keamanan di gudang ( 3 Unit gudang) TW 1</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Deviasi keuangan sebesar Rp. 404.400,- terdiri dari : 1. Bel. Jasa kebersihan Rp. 368.400,- dan Bel. Jasa keamanan Rp. 36.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
1.8	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.338.600	21,11	21,11	0,00	71.516.500	17,34	54.958.428	13,33	4,01				
1.8.1	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			<p>1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
1.8.2	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.657.000	16,31	16,31	0,00	31.276.500	12,89	28.200.000	11,62	1,27			<p>1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari Unit</p> <p>2. Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional roda 4 : 1 Unit dari Unit</p> <p>3. Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional roda 2 : Unit dari Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersesainya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 ( 4 kendaraan )</p> <p>2. Tersesainya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 ( 6 kendaraan )</p> <p>3. Terpenuhinya belanja operasional kendaraan dinas (BBM) untuk roda 2 dan 4</p> <p>4. Tersesainya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 , AB 1056 IA</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.116.000,- terdiri dari : 1. Bel. BBM Rp. 70.000,- dan Bel. Perizinan kendaraan Rp. 3.046.500,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
1.8.3	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.181.600	29,32	29,32	0,00	25.240.000	23,55	12.090.000	11,28	12,27			<p>1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari Unit</p> <p>2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara berupa Mesin Ketik : 1 Unit dari Unit</p> <p>3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara berupa AC / Pendingin ruangan : Unit dari Unit</p> <p>4. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara berupa</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terpeliharanya peralatan kantor berupa kursi</p> <p>2. Terpeliharanya peralatan/mesin kantor berupa komputer</p> <p>3. Terpeliharanya mesin CCTV</p> <p>4. Terpeliharanya peralatan/mesin kantor berupa printer</p> <p>5. Terpeliharanya peralatan kantor berupa mesin ketik</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 13.150.000,- terdiri dari : 1. Bel. Pemeliharaan AC sebesar Rp. 7.850.000,- 2. Bel. Pemeliharaan Komputer</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														CCTV : Unit dari Unit 5. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara berupa Kursi /Mebel : Unit dari Unit 6. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara berupa Komputer dan Printer : 1 Unit dari Unit	Rp. 5.050.000,- dan Bel. Pemeliharaan Printer Rp. 250.000,- di karenakan anggaran bersifat persediaan sehingga realisasi menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.8.4	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	26,77	26,77	0,00	15.000.000	25,00	14.668.428	24,45	0,55			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari Unit 2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Gudang Badran : Unit dari Unit 3. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Gudang Abubakar : Unit dari Unit 4. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Depo Arsip Kotagede : 1 Unit dari Unit 5. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Gedung Induk Unit III : 1 Unit dari Unit 6. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Gedung Induk Unit IV : Unit dari Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terkumpulnya data terkait kondisi bangunan gedung kantor 2. Terkumpulnya data terkait kondisi bangunan Depo arsip 3. Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Unit 3 4. Terpenuhinya pemeliharaan gudang depo <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 331.572,- terdiri dari : 1. Bel. Pemeliharaan Gedung kantor Rp. 99.572,- dan Bel. Pemeliharaan gudang Rp. 232.000,- , adalah merupakan sisa angkas <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2	5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.418.603.328.914</b>	<b>13,99</b>	<b>13,99</b>	<b>0,00</b>	<b>193.863.587.390</b>	<b>13,67</b>	<b>126.538.825.283</b>	<b>8,92</b>	<b>4,75</b>				
2.1	5.02.02.1.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>956.622.200</b>	<b>23,30</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>175.905.900</b>	<b>18,39</b>	<b>162.760.100</b>	<b>17,01</b>	<b>1,38</b>				
2.1.1	5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	78.726.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun : Dokumen dari Dokumen 2. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun: KUA : dokumen dari dokumen 3. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun: PPAS : dokumen dari dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.2	5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.226.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Disusun : Dokumen dari Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun: Perubahan KUA : dokumen dari dokumen</p> <p>3. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun: Perubahan PPAS : dokumen dari dokumen</p>	<b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.3	5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi : Dokumen dari Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.1.4	5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi : Dokumen dari Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.1.5	5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	309.815.600	61,00	61,00	0,00	164.291.500	53,03	152.917.700	49,36	3,67			1. Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi : 32 Dokumen dari Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Melakukan pencermatan atas draft DPA yang diusulkan oleh OPD. Untuk kemudian diterbitkan DPA. Penerbitan DPA diikuti oleh pembuatan dan pencetakan SPD. Sebagai hasil dari peletakan aliran kas oleh OPD. SPD untuk tahun 2023 ini sudah menggunakan tanda tangan elektronik untuk pengesahannya.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 6.873.800,- terdiri dari : 1. Bel Alat Tulis Kantor Rp. 2.000,- 2. Bel. bahan komputer Rp. 296.800,- 3. Bel makan minum rapat Rp. 75.000,- dan Bel Honorarium Tim sebesar Rp. 6.500.000,- dikarenakan ada beberapa jabatan yang kosong</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
2.1.6	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	222.515.500	2,00	2,00	0,00	1.300.000	0,58	936.000	0,42	0,16			<p>1. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD : Dokumen dari Dokumen</p> <p>2. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD: Perda APBD : dokumen dari dokumen</p> <p>3. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD: Perkada Penjabaran APBD : dokumen dari dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya makan dan minum rapat Koordinasi penyusunan Perda APBD Tersedianya bahan / sarana pendukung kegiatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan Target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 364.000,- terdiri dari : 1. Bel. cetak Rp. 214.000,- dan bel. makan minum rapat sebesar Rp. 150.000,- dalam proses SPJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
2.1.7	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	242.782.000	10,00	10,00	0,00	5.800.000	2,39	4.392.000	1,81	0,58			<p>1. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD : Dokumen dari Dokumen</p> <p>2. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD: Peraturan Daerah Perubahan APBD : 0 dokumen dari dokumen</p> <p>3. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD: Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Perubahan APBD : 0 dokumen dari dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi internal Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Perubahan Atas Pergub No 86 tentang Penjabaran APBD TA. 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.408.000,- terdiri dari : Belum di laksanakan : 1. Bel. Cetak Rp. 1.108.000,- dan 2. Bel. Makan dan minum rapat Rp. 300.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.1.8	5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25.557.100	20,40	20,40	0,00	4.514.400	17,66	4.514.400	17,66	0,00			<p>1. Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran : Dokumen dari Dokumen</p> <p>2. Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: Keputusan Gubernur tentang Penetapan bendahara dan KPA BOS : dokumen dari dokumen</p> <p>3. Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: Pergub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri : dokumen dari dokumen</p> <p>4. Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: Kepgub tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos : dokumen dari dokumen</p> <p>5. Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: Kepgub tentang Penetapan KPA Dana Dekonsentrasi (sesuai jumlah DIPA) : dokumen dari dokumen</p> <p>6. Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: Kepgub tentang Penetapan Bendahara KPA/KPB APBD : dokumen dari dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Review Usulan perubahan tarif pada SMK Terlaksananya finalisasi Perencanaan BLUD tahun 2024 Terlaksananya Pencermatan tarif pada SMK Terlaksananya Tindak lanjut fasilitasi kemendagri terkait Penyusunan Pergub BKK ' Tersusunnya Rancangan Pergub tentang Sisduk Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan perlu direkonstruksi dan diintegrasikan sesuai dengan surat Sekretariat Daerah Nomor 188/5471 tanggal 27 Desember 2022. Proses Diusulkan untuk dihapuskan TUK penetapan hibah dan bansos pada Perubahan RKPDIY Tahun 2023 dan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret Terdapat antrian harmonisasi Pergub-Pergub Tusi yang diusulkan oleh OPD-OPD yang dilakukan di Bagian Perundangan Biro Hukum Setda DIY.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar OPD terkait dan bidang-bidang di BPKA DIY.</p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
<b>2.2</b>	<b>5.02.02.1.02</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>256.195.700</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.800</b>	<b>1,84</b>	<b>4.458.300</b>	<b>1,74</b>	<b>0,10</b>				
2.2.1	5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan	83.660.600	3,47	3,47	0,00	405.000	0,48	405.000	0,48	0,00			<p>1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 'Menyampaikan personil Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023 kepada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai satker</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota												<p>Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota : Laporan dari Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota: evaluasi RAPBD Kota : laporan dari laporan</p> <p>3. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota: evaluasi RAPBD Bantul : laporan dari laporan</p> <p>4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota: evaluasi RAPBD Kulonprogo : laporan dari laporan</p> <p>5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul : laporan dari laporan</p> <p>6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota: evaluasi RAPBD Sleman : laporan dari laporan</p>	<p>pengampu Dana Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat</p> <p>Bidang BAKD telah menerima Keputusan Gubernur Nomor 160/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi RAPBD Kab/Kota dari Bidang Aset dan ditindaklanjuti dengan penyusunan surat permohonan personil tim evaluasi RAPBD Kab/Kota nomor 878/02771/BAKD tanggal 28 Maret 2023 yang ditujukan kepada OPD-OPD tim evaluasi di Pemda DIY.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</li> <li>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>
2.2.2	5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	83.660.600	0,30	0,30	0,00	241.700	0,29	241.700	0,29	0,00			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota : Laporan dari Laporan</li> <li>2. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota: evaluasi RPAPBD Kota : laporan dari laporan</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya bahan / sarana pendukung kegiatan Tersusnya Keputusan Gubernur Nomor 160/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi RAPBD Kab/Kota dari Bidang Aset dan ditindaklanjuti dengan penyusunan surat permohonan personil tim evaluasi RAPBD Kab/Kota nomor 878/02771/BAKD tanggal 28 Maret 2023 yang ditujukan kepada OPD-OPD tim evaluasi di Pemda DIY.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</li> <li>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>3. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota: evaluasi RPAPBD Bantul : laporan dari laporan</p> <p>4. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota: evaluasi RPAPBD Kulonprogo : laporan dari laporan</p> <p>5. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota: evaluasi RPAPBD Gunungkidul : laporan dari laporan</p> <p>6. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota: evaluasi RPAPBD Sleman : laporan dari laporan</p>	
2.2.3	5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	83.660.600	0,67	0,67	0,00	561.700	0,67	561.700	0,67	0,00			<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota : Laporan dari Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota: Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota : laporan dari laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya bahan Rancangan Perda Keputusan Gubernur Nomor 160/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi RAPBD Kab/Kota dari Bidang Aset dan ditindaklanjuti dengan penyusunan surat permohonan personil tim evaluasi RAPBD Kab/Kota nomor 878/02771/BAKD tanggal 28 Maret 2023 yang ditujukan kepada OPD-OPD tim evaluasi di Pemda DIY.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>3. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota: Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Bantul : laporan dari laporan</p> <p>4. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota: Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kulonprogo : laporan dari laporan</p> <p>5. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota: Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Gunungkidul : laporan dari laporan</p> <p>6. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota: Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Sleman : laporan dari laporan</p>	
2.2.4	5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	5.213.900	68,52	68,52	0,00	3.497.400	67,08	3.249.900	62,33	4,75			<p>1. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah : dokumen dari dokumen</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 247.200,- terdiri dari : 1. Belanja cetak Rp. 172.200,- dan Belanja makan minum rapat sebesar Rp. 75.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi dengan satker bisa dilakukan dengan rapat online</p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah: laporan keuangan dana dekon dan TP di DIY tahun 2022 : 1 dokumen dari dokumen 3. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah: laporan keuangan dana dekon dan TP di DIY tahun 2023 : dokumen dari dokumen	tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
2.3	5.02.02.1.03	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>151.970.500</b>	<b>33,36</b>	<b>33,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45.783.500</b>	<b>30,13</b>	<b>35.925.429</b>	<b>23,64</b>	<b>6,49</b>				
2.3.1	5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	89.310.000	7,30	7,30	0,00	1.650.000	1,85	1.650.000	1,85	0,00			<p>1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) : Laporan dari Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK): Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas : laporan dari laporan</p> <p>3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Melakukan proses verifikasi data potongan tiap bulan oleh PKD Melakukan komunikasi intens dengan pihak ketiga yang terkait dengan potongan yang akan direkonkan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi sudah sesuai dengan target pada bulan Maret SIPD modul penatausahaan yang digunakan saat ini, masih belum bisa menyajikan menu untuk mempermudah pembuatan rekap ataupun laporan yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi potongan dengan pihak ketiga.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK): Pelaksanaan pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga : laporan dari laporan	
2.3.2	5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.660.500	70,50	70,50	0,00	44.133.500	70,43	34.275.429	54,70	15,73			1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait : 311 Dokumen dari Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Diterimanya SPM dari OPD untuk kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Ketika dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, maka dilanjutkan dengan penerbitan SP2D. Menyusun BA Verifikasi merupakan syarat pencairan dana keistimewaan tahap berikutnya.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 9.858.071,- terdiri dari : Bel. alat tulis kantor Rp. 238.600,- 2. Bel. kertas dan cover Rp. 10.000,- 3. Bel. bahan komputer Rp. 2.581.600,- 4. Bel. makan minum rapayt Rp. 135.000,- dan Belanja perjalanan dinas Rp. 6.892.871 SIPD modul penatausahaan yang digunakan saat ini, masih belum bisa menyajikan menu untuk mempermudah pembuatan rekap ataupun laporan yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi potongan dengan pihak ketiga.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
<b>2.4</b>	<b>5.02.02.1.04</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>540.358.700</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.403.600</b>	<b>4,52</b>	<b>16.691.100</b>	<b>3,09</b>	<b>1,43</b>				
2.4.1	5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13.857.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2023 selesai bulan Juli tahun 2023 : dokumen dari dokumen 2. Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran : laporan dari laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.4.2	5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17.484.400	100,00	100,00	0,00	17.484.400	100,00	11.571.900	66,18	33,82			1. Laporan Keuangan Audited 2022 : dokumen dari dokumen 2. Laporan Keuangan Unaudited 2022 : 1 dokumen dari dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan unaudited 2. Proses koreksi dari BPK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Modul AKLAP pada aplikasi SIPD belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyusunan laporan keuangan Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															6.912.500,- terdiri dari : 1. Belanja cetak sebesar Rp. 6.612.500,- di karenakan untuk cetak laporan keuangan audited, masih menunggu koreksi dari BPK yang baru di kirimkan pada akhir maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2.4.3	5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	340.453.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi : Dokumen dari Dokumen 2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi: Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : dokumen dari dokumen 3. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi: Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : dokumen dari dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.4	5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.051.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima : dokumen dari dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.5	5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5.778.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi : dokumen dari dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.6	5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	110.777.200	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Sistem informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah : sistem dari sistem	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.7	5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	16.704.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi : Orang dari Orang</li> <li>Sumberdaya manusia yang handal dan kompeten orang dalam pelaporan dan pertanggungjawaban : orang dari orang</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.4.8	5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	30.251.600	25,40	25,40	0,00	6.919.200	22,87	5.119.200	16,92	5,95			<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina : Lembaga dari Lembaga</li> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang dibina: RS Grhasia : lembaga dari lembaga</li> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang dibina: RS Respira : lembaga dari lembaga</li> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang dibina: Balabkes : lembaga dari lembaga</li> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang dibina: Bapelkes : lembaga dari lembaga</li> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang dibina: BLPT : lembaga dari lembaga</li> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang dibina: SMKN 6 Yk : lembaga dari lembaga</li> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang dibina: SMKN 1 Sewon : lembaga dari lembaga</li> <li>Jumlah BLUD Provinsi yang dibina: SMKN 3 Wonosari : lembaga dari lembaga</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terselesaikannya pembahasan penggunaan ambang batas pada BLUD Terlaksananya Bimtek Penganggaran BLUD 'Sosialisasi terkait dengan Pergub DIY Nomor 91 Tahun 2019 tentang BLUD yang dilakukan di SMK Negeri 5 Yogyakarta</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.800.000,- terdiri dari : 1. Bel. makan dan minum rapat sebesar Rp. 300.000,- dalam proses SPJ dan Bel. Honorarium Narasumber sebesar Rp. 1.500.000,- dikarenakan realisasi Narsum yang hadir pada saat Bimtek di bawah level yang di anggarkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
<b>2.5</b>	<b>5.02.02.1.05</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.416.698.181.814</b>	<b>13,99</b>	<b>13,99</b>	<b>0,00</b>	<b>193.612.788.590</b>	<b>13,67</b>	<b>126.318.990.354</b>	<b>8,92</b>	<b>4,75</b>				
2.5.1	5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	792.477.600	3,67	3,67	0,00	17.077.900	2,16	17.077.900	2,16	0,00			<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah : Laporan dari Laporan</li> <li>Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Deviden BUKP Rp3.675.000.000 : laporan dari laporan</li> <li>Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Deviden BUMD Rp106.254.444.524 : laporan dari laporan</li> <li>Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Hasil Audit KAP terhadap Laporan Keuangan BUKP Tahun</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> proses pengumpulan data dan analisa terkait Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2022 Tersedianya bahan pendukung kegiatan Terlaksananya Rapat kera BUKP Terlaksananya Pembinaan BUKP Terlaksananya Evaluasi kinerja BUKP tahun 2022 proses pengumpulan data dan analisa Hasil Audit KAP terhadap Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Buku 2022 : laporan dari laporan 5. Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Naskah Akademik Kelembagaan BUKP : laporan dari laporan 6. Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: keputusan Gubernur tentang Pembagian Laba Bersih BUKP Tahun N-1 : laporan dari laporan 7. Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan BUKP Tahun Buku N-1 : laporan dari laporan 8. Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Keputusan Kepala BPKA tentang RKAT berdasarkan SE Pedoman Penyusun RKAT 2024 selambat-lambatnya akhir Nopember 2023 : laporan dari laporan 9. Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Nilai NPL BUKP 20,00 : laporan dari laporan 10. Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Seleksi Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD : laporan dari laporan	DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
2.5.2	5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	584.208.683.900	32,00	32,00	0,00	186.595.710.690	31,94	126.112.912.454	21,59	10,35			1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan : Laporan dari Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi penanganan berkas/ pengajuan BKK Menyusun alur/proses penanganan pengajuan BKK Pembagian tugas penanganan berkas BKK Terealisasinya pencairan BKK berupa bantuan kegiatan Padat karya infrastruktur di Kab Bantul Terealisasinya pencairan BKK dana DAIS tahap 1 untuk Kota, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul Pengembangan petani bawang di Kulonprogo Terealisasinya pencairan BKK kepada kalurahan kalurahan untuk kegiatan padat karya joga istimewa Terselesaikannya pencairan BKK kepada kapanewon untuk kegiatan tata kelola pemerintahan dan untuk desa mandiri budaya Terselesaikannya pencairan BKK kepada kapanewon untuk kegiatan DEsa Prima Terselesaikannya pencairan BKK kepada kalurahan wonolelo untuk kegiatan pengembangan petani tembakau <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan menyesuaikan berkas yang masuk di BPKA dan sudah terverifikasi <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
2.5.3	5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	26.021.177.076	27,50	27,50	0,00	7.000.000.000	26,90	189.000.000	0,73	26,17			1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak : 1 Laporan dari Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terealisasinya Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk jatah hidup 63 mahasiswa dari Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di DIY, yang terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur pada 21 November 2022, bulan Januari - Juni 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan menyesuaikan pengajuan , sesuai kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>
2.5.4	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	805.675.843.238	0,50	0,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi : Laporan dari Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi penanganan dana bagi hasil</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
3	5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.617.409.040</b>	<b>14,73</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>	<b>267.547.400</b>	<b>10,22</b>	<b>213.744.332</b>	<b>8,17</b>	<b>2,05</b>				
3.1	5.02.03.1.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.617.409.040</b>	<b>14,73</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>	<b>267.547.400</b>	<b>10,22</b>	<b>213.744.332</b>	<b>8,17</b>	<b>2,05</b>				
3.1.1	5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	415.699.000	27,00	27,00	0,00	71.299.000	17,15	61.226.200	14,73	2,42			1. Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 : dari 2. Jumlah Standar Harga yang disusun : dokumen dari dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Database Standar Harga Tahun 2023 telah diupload di aplikasi SIPD - Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Standar Harga yang dihadiri oleh TAPD dan OPD Pemda DIY - Usulan Standar Harga baru dari OPD ditampung, dikompilasi, dicermati, dan diupload pada aplikasi SIPD - Saat ini Rapergub SSH, SBU, HSPK, dan ASB selesai di Juli 2022 - Aplikasi Penyusunan Standar Harga dalam proses pengembangan oleh Penyedia - Pergub SHBJ sudah Selesai dan telah di cetak buku pergub SHBJ - Cetak Pergub SHBJ 2023 - laporan survey terkait SHBJ 2024 - rapat koordinasi penyusunan ASB untuk SHBJ 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 10.072.800,- terdiri dari : 1. Bel. kertas dan cover Rp. 2.000,- 2. Bel. makan dan minum rapat Rp. 8.070.000,- dalam proses SPJ dan 3. Bel. Honorarium Rp. 2.000.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
3.1.2	5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	69.622.200	0,41	0,41	0,00	285.000	0,41	285.000	0,41	0,00			1. Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun : dokumen dari dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <sup>1</sup> proses pengadaan pengembangan aplikasi RKBMD  <sup>2</sup> Terbitnya SE penyusunan RKBMD 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,  2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,  3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p> koordinasi RKBMD dengan OPD terkait perubahan RKBMD 2023 mulai dilaksanakan
3.1.3	5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	154.885.100	7,40	7,40	0,00	11.729.900	7,57	11.368.400	7,34	0,23			1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah : Laporan dari Laporan 2. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah: laporan aset tetap dan aset lainnya : 1 laporan dari laporan 3. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah: laporan persediaan : laporan dari laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  'Pendampingan aplikasi Persediaan tahap 1  'Rapat Rekon Aset Tetap 1</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  REalisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 361.500,- terdiri dari : 1. Bel. ATK sebesar Rp. 1.500,- dan 2. Bel, makan dan minum rapat Rp. 360.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  Tersedianya pengembangan aplikasi aset tetap dan persediaan yang telah menyesuaikan perkembangan kebutuhan dalam penyusunan laporan BMD. Adanya pendampingan dan rekonsiliasi secara berkelanjutan dengan seluruh Pengurus Barang di lingkungan Pemda DIY</p>
3.1.4	5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.621.752.240	10,50	10,50	0,00	132.150.000	8,15	89.026.832	5,49	2,66			1. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah : Laporan dari Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah: dokumen laporan pengamanan BMD : laporan dari laporan 3. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah: dokumen asuransi BMD : laporan dari laporan 4. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah: dokumen rehabilitasi bangunan : laporan dari laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  koordinasi pengamanan dan pemeliharaan BMD rapat koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah dan monitoring proses pendaftaran sertifikasi 2023 di BPN telah dilaksanakan untuk 10 bidang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 43.123.168,- terdiri dari : 1. Bel. Jasa keamanan sebesar Rp. 2.380.000,- karena ada penjaga yang baru masuk pd bulan januari pertengahan, 2. Bel. tagihan listrik sebesar Rp. 27.993.168,- di karenakan anggaran bersifat persediaan sehingga realisasi menyesuaikan tagihan, 3. Bel. Registrasi sebesar Rp. 12.750.000,- di karenakan dokumen sertifikat tergantung proses dari pihak eksternal Pemda DIY yaitu pihak BPN</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,  2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,  3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															koordinasi dengan pihak diluar pemda DIY dalam hal ini BPN yang menyesuaikan waktu dari BPN
3.1.5	5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	208.477.000	15,00	15,00	0,00	1.000.000	0,48	925.000	0,44	0,04			<p>1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah : Laporan dari Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah: dokumen penilaian BMD 1 : laporan dari laporan</p> <p>3. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah: dokumen penilaian BMD 2 : laporan dari laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi dan Survey lapangan terkait BMD yang akan di nilai oleh KJPP</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 75.000,- pada belanja makan dan minum rapat tingkat pertumbuhan dan kondisi ekonomi menjadi penghambat dalam menentukan nilai 5 tahun kedepan terhadap penilaian BMD.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
3.1.6	5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	146.973.500	40,80	40,80	0,00	51.083.500	34,76	50.912.900	34,64	0,12			<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 3 : dari</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah: Pemindahtanganan BMD : dokumen dari dokumen</p> <p>3. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah: Pemusnahan BMD : dokumen dari dokumen</p> <p>4. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah: Penghapusan BMD : dokumen dari dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Telah dilakukan lelang ulang Bangunan Gedung eks BPTTG melalui KPKNL Yogyakarta, akan tetapi dinyatakan Tidak Ada Penawaran (TAP). - Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya, terjual dengan harga Rp466.666.000,- - Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada UPTD BPRSW Dinas Sosial DIY, terjual dengan harga 35.199.999,- - Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah di Jl Panembahan 20 YK, terjual dengan harga 127.777.000,- - Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada RS Grasia terjual dengan harga 32.500.000,- - Penjualan Bangunan Gedung BP3MBTP (DINAS PERTANIAN) an SUHARTI - Penjualan sisa bongkaran Balapkes an Buhori - Rapat Koordinasi dalam rangka pemindahtanganan dan penghapusan BMD untuk Tahun Anggaran 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Proses persetujuan Gubernur (Keputusan Gubernur) memerlukan waktu lama. REalisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 170.600,- terdiri dari : 1. Bel. makan minum rapat Rp. 150.000,- dan Bel. kertas dan cover Rp. 20.600,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.207.695.400	8,38	8,38	0,00	268.659.800	8,38	254.761.450	7,94	0,44				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.207.695.400	8,38	8,38	0,00	268.659.800	8,38	254.761.450	7,94	0,44				
4.1.1	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.739.486.000	7,39	7,39	0,00	202.419.800	7,39	192.196.450	7,02	0,37			1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 : dari 2. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah : dokumen dari dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Daerah</li> <li>2. Terlaksananya Rapat Pemungutan PKB dan BBNKB</li> <li>3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan NA dan Raperda</li> <li>4. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik/Nonfisik</li> <li>5. Penyusunan Naskah Akademik Perda Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>6. Rapat Intensifikasi Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 10.223.350,- terdiri dari : Belum di belanakan : 1. Bel. ATK Rp. 98.200,- 2. Bel. Kertas dan cover Rp. 312.000,- 3. Bel. bahan komputer Rp. 334.900,- dan Bel. makan dan minum rapat Rp. 1.785.000,- dalam proses SPJ sedangkan untuk Bel. makan minum lapangan sebesar Rp. 3.430.000,- dan Bel Jasa layanan umum sebesar Rp. 3.900.000,- di karenakan realisasi di atas tanggal 25 si SPJ kan di bulan berikutnya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</li> <li>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol>
4.1.2	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	77.580.000	15,86	15,86	0,00	12.300.000	15,85	12.225.000	15,76	0,09			1. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah : Laporan dari Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat Pencermatan RKA Pendapatan</li> <li>2. Rapat Penyusunan Perencanaan Pendapatan Retribusi</li> <li>3. Rapat Koordinasi DBH CHT</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023,</li> <li>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol>
4.1.3	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	377.129.400	14,31	14,31	0,00	53.940.000	14,30	50.340.000	13,35	0,95			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 : dari 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah : 1 laporan dari laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Siaran Langsung sosialisasi perpajakan di Radio</li> <li>2. Terlaksananya Sosialisasi PPh 21</li> <li>3. Terlaksananya Program Televisi Talkshow</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- adalah Bel. paket meeting di karenakan merupakan Uang Transport Peserta Sosialisasi PPh 21, karena peserta merupakan PNS</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPA Nomor DPA/A.1/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
4.1.4	5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	13.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah : Laporan dari Laporan</li> <li>2. Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah: Laporan perkembangan ETPD semester 1 : laporan dari laporan</li> <li>3. Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah: Laporan perkembangan ETPD semester 2 : laporan dari laporan</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
<b>Jumlah</b>			<b>1.508.679.398.786</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22</b>		<b>204.870.322.835</b>	<b>13,58</b>	<b>132.946.284.754</b>	<b>8,81</b>					